

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU-BUKU

- Adi Sujatno. 2000. Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan). Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakata
- Achmad S. Soemadi Pradja dan Atmasasmita, Sistem Pemasarakatan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1979.
- Dunn, William, N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press
- Edward III. C George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merille S. (2000), *Politic and Imlementation in The Third World*, Princeton University press, Princeton New Jersey.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*, Jakarta: PT. GunungAgung.
- Jhon W. Creswell *Reseach Design 2016- Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi keempat)*.
- Kurniadi.2019. Journal Tinjauan Singkat Mengenai Kebijakan Publik, Politik, Dan Teknik. Bandung
- Leden Marpaung. 1995. Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika
- Mazmanian, Daniel and Sabastier. 2006. *Efektive Policy Implementation*, Lexington, Mass DC Heayh.

- Meter, Donald, S. Van & Carl R Van Horn. 2005. *The Policy Implementation Process; A Conceptual frame Work*,. Beverly Hills Sage Publication Inc.
- Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Ndraha, Taliziduhu, 2002, *Kybernology*, Edisi 2. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan,
- Priyatno, Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. jakarta: Grafika
- Sedarmayanti. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar.Maju
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (Ed). 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta Erlangga
- Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Undang – undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
4. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
5. Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang–undangan RI No.M.09.HN 02.10 tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham No.03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat